

Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Media Penguatan Program PKH Desa Kadudampit Kecamatan Sukabumi

Rafi Audy Nugraha¹, Miladul Khoiriyah², Sara Junial Fitri³, Alma Devina⁴, Ellies Sukmawati⁵

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Article Info

Article history:

Received : 20 March 2023

Publish : 23 March 2023

Keywords:

Games

Literacy

Method

Abstract

Poverty is a condition where there is an inability to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education and health. This condition results in a decrease in the quality of human resources so that the productivity and income they earn are low. In Indonesia the Hope Program (PKH) has become one of the Assistance Programs that contributes to poverty alleviation efforts. This study aims to determine the implementation of participatory rural appraisal (PRA) as a medium for strengthening the PKH program in Kadudampit Village, Sukabumi Regency. The research method used in this research is Participatory Rural Appraisal (PRA). The data collection method used was a Forum Group Discussion (FGD) with group leaders and PKH members in Kadudampit Village. Based on the results of research through PRA and FGD with the PRA Team and participants, it shows that it is necessary; (1) Management of good coordination flow between PKH group heads and members, (2) Formation of a management structure within a PKH group, (3) KPM Skills Training through Utilization of Village Resource Potentials.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 20 Maret 2023

Publis : 23 Maret 2023

Abstrak

Kemiskinan merupakan suatu keadaan terjadinya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Di Indonesia Program Harapan (PKH) sudah menjadi salah satu Program Bantuan yang berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi participatory rural appraisal (PRA) sebagai media penguatan program PKH di Desa Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Forum Group Discussion (FGD) bersama ketua kelompok dan anggota PKH di Desa Kadudampit. Berdasarkan hasil penelitian melalui PRA dan FGD bersama Tim dan peserta PRA menunjukkan bahwa diperlukannya; (1) Manajemen alur koordinasi yang baik antara ketua dan anggota kelompok PKH, (2) Pembentukan struktur kepengurusan dalam suatu kelompok PKH, (3) Pelatihan Keterampilan KPM melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rafi Audy Nugraha

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: rafiudy63@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di masyarakat disebabkan oleh keterkaitan beragam faktor-faktor yang membentuk jaringan dan perangkap kemiskinan (Soetomo, 2006), meliputi (1) faktor kelemahan fisik, yang disebabkan kondisi kesehatan dan gizi buruk, sehingga produktivitas kerja rendah; (2) faktor isolasi, yaitu lingkup jaringan interaksi sosial terbatas, serta akses terhadap informasi,

peluang ekonomi dan fasilitas pelayanan yang terbatas pula; (3) faktor kerentanan adalah tingkat kemampuan rendah untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi persoalan yang mendadak; (4) faktor ketidakberdayaan, dapat dilihat dari akses pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya serta posisi tawar (*bargaining position*). Ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, dapat ditinjau dari sisi ekonomi dengan berbagai faktor. *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, karena penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dengan kualitas yang rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. (Kuncoro, 1997) Kompleksitas persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik dan jika ditelusuri lebih jauh, sebuah adanya inisiasi untuk merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Kementerian Sosial RI, 2021) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin berupa bantuan tunai bersyarat yaitu peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan. Landasan hukum terbaru PKH yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. (Sari & Marom, 2020:3) Tujuan PKH berdasarkan Buku Pedoman PKH tahun 2021 yaitu:

- (1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,
- (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan,
- (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social
- (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- (5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Program Keluarga Harapan sudah ada di Desa Kadudampit sejak tahun 2009. Program ini telah membantu masyarakat Desa Kadudampit dalam bantuan sosial untuk mengurangi beban dari keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan yang ada di masyarakat tentang PKH di Desa Kadudampit yaitu bantuan dana yang tidak tepat waktu dalam pencairannya, adanya kesenjangan sosial antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Non-KPM yang menimbulkan asumsi program tersebut tidak tepat sasaran. Kemudian kendala dalam hal koordinasi dalam pelaporan pencairan dana PKH antara ketua kelompok PKH dan anggotanya karena kelengkapan data dibutuhkan untuk baik tidaknya sistem pengelolaan PKH yang ada di Desa Kadudampit. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) di hadirkan di Kabupaten Sukabumi untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Kadudampit. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Kadudampit Khususnya Desa Kadudampit untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat penerima KPM dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu cara yang cukup relevan untuk mengkaji kondisi lingkungan pedesaan adalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penelitian. Dalam hal ini partisipasi dari masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu metodologi yang sering kita dengar di kalangan masyarakat yakni PAR.

PAR (*Participatory Action Research*) adalah suatu proses pembelajaran dan perubahan yang berlangsung di berbagai tingkatan masyarakat. Dimana dengan PAR, masyarakat mendapatkan keterampilan, pengalaman dan pengetahuan baru yang menjadikan diri mereka sendiri dan komunitas menjadi terampil. (Miller et al., 2020) Dalam PAR teknik yang digunakan untuk dapat mengukur peran serta dan keterlibatan maupun partisipasi dari masyarakat dan komunitas, yakni dengan menggunakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA diartikan sebagai pengkajian keadaan desa. Kajian bisa berbentuk kegiatan penelitian yang meliputi aspek kehidupan masyarakat. Kajian yang dapat dilakukan bermacam-macam, tergantung aspek dan kebutuhan, bisa mengambil aspek perekonomian masyarakat di bidang pertanian, potensi SDA/SDM dan bisa juga non pertanian. Bahkan, bisa juga mengambil dari kehidupan sosial-budaya masyarakat, pendidikan, kesehatan hingga kehidupan politik. Pada prinsipnya, hasil dari kajian tersebut menghasilkan tiga hal, sebagai berikut.

1. Memperoleh informasi terkait kondisi kehidupan di daerah/desa tersebut.
2. Memperoleh informasi terkait dengan kebutuhan dan “permasalahan” yang menjadi masalah/kendala masyarakat itu sendiri.
3. Memperoleh informasi terkait dengan potensi lokal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan SDA dan SDM untuk masyarakat sekitar. (Muhsin et al., 2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauhmana *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dapat menjadi media membangun kapasitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat mencapai tujuan program PKH. Hasil kajian memberikan output tentang kemampuan KPM mengidentifikasi akar permasalahan serta menggali potensi untuk menguatkan Program Keluarga Harapan

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian *participatory rural appraisal* (PRA). sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu sebagai berikut:

- a. Informan dari aparaturnya Desa Kadudampit, Pendamping PKH, dan ketua kelompok PKH
- b. Anggota keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga sebagai subjek penelitian dan dipilih secara sengaja, sesuai dengan karakteristik penelitian. Penerima program bantuan dan masyarakat yang dimaksud adalah yang berdomisili di Desa Kadudampit.

Fokus penelitian adalah mengetahui implementasi pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai media penguatan Program PKH di Desa Kadudampit. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara bertujuan untuk memperoleh data utama dari subjek penelitian untuk menjawab fokus penelitian dan dokumentasi sebagai pendukung data. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk menelaah tahapan perencanaan dan tindakan pada program PKH. (Ridwan et al., 2019) Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu sebagai berikut:

- a. Informan dari aparaturnya Desa Kadudampit, Pendamping PKH, dan ketua kelompok PKH
- b. Anggota keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga sebagai subjek penelitian dan dipilih secara sengaja, sesuai dengan karakteristik penelitian. Penerima program bantuan dan masyarakat yang dimaksud adalah yang berdomisili di Desa Kadudampit dan akan dilakukan melalui forum diskusi (*Forum Discussion Group*).

Pada pelaksanaan kegiatan diskusi PRA menggunakan beberapa teknik PRA sebagai berikut:

1. **Diagram Venn**, merupakan Teknik PRA yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan tokoh atau lembaga yang ada di lingkungan masyarakat. Diagram Venn ini digambarkan dalam bentuk lingkaran yang menunjukkan besaran manfaat, pengaruh dan kedekatan hubungan antara tokoh atau lembaga kepada masyarakat. Jarak dan ukuran besar kecilnya lingkaran menunjukkan peran, pengaruh juga kedekatan yang dirasakan oleh

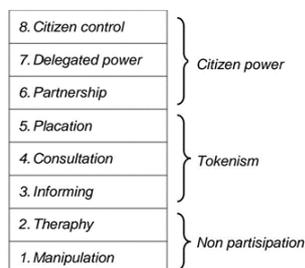
masyarakat terhadap suatu tokoh atau Lembaga yang ada di wilayah tersebut.(A Supriatna, 2014)

2. **Pohon Masalah**, Pohon Masalah atau *Tree Diagram* adalah diagram sistematis atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat.(Silverman & Silverman, 1994) Pohon Masalah digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab suatu masalah (akar pohon), Masalah (batang pohon), akibat (dahan pohon), dan dampak (daun) yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu masalah tersebut muncul dan dampak yang akan Nampak hasil dari adanya suatu masalah tersebut
3. **Bagan Perubahan dan Kecenderungan**, merupakan Teknik PRA yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan berbagai keadaan juga kejadian serta kegiatan yang ada di masyarakat dari waktu ke waktu. Sehingga masyarakat dapat mengamati adanya kecenderungan perubahan yang terjadi baik itu berkurang, tetap ataupun bertambah.(Lestari et al., 2020).

Adapun data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan berbagai cara antara lain, Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Metode yang digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukan.

Lokasi penelitian berada di Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi Jawa Barat. *Desa* ini terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun kadudampit 1, Dusun Kadudampit 2, Dusun Lebak Nangka 1, dan Lebak Nangka 2, Ke empat dusun adalah merupakan lokasi penyelenggaraan PRA, yang berlangsung pada tanggal 19 Juli – 21 Agustus 2022.

Partisipasi dapat dilihat melalui tipologi partisipasi teori Arnstein yaitu tahapan partisipasi yang terdiri dari pengambilan keputusan atau perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi atau penilaian hasil. Menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam setiap tahapan suatu program dengan menggunakan perumpamaan tangga partisipasi. (Purnaningsih & Lestari, 2021). Tangga partisipasi Arnstein adalah sebagai berikut: (1) manipulation, (2) therapy (3) informing, (4) consultation, (5) placation, (6) partnership, (7) delegated power, dan (8) citizen control.



Referensi : Teori Arnstein tahapan partisipasi (Purnaningsih & Lestari, 2021)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai di Desa Kadudampit sejak tahun 2009. Program ini diharapkan membantu masyarakat Desa Kadudampit dalam bantuan sosial untuk mengurangi beban dari keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jumlah kelompok yang ada yaitu terdiri dari 13 kelompok dan rata-rata penerimanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada pelaksanaan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) sangat menekankan pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam setiap rangkaian kegiatan dan peningkatan kemandirian dalam masyarakat. Melalui metode PRA masyarakat desa bukan lagi sebagai objek yang menerima program dari atas (*top-down*) tetapi menjadi subjek pembangunan yang merancang program (*bottom-up*) dengan terus aktif dalam proses perencanaan, penentuan skala prioritas, penganggaran, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan yang dikendalikan di desa.

Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadikan program dapat dilaksanakan dan dapat lebih berhasil guna mencapai kesejahteraan mereka. (Hudayana et al., 2019) Peneliti dalam pelaksanaan teknik PRA adalah sebagai fasilitator, dimana memiliki peran yaitu memfasilitasi kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan, juga bertugas membantu masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi, terlibat dan merumuskan kesepakatan yang ingin dicapai bersama serta melakukan evaluasi dan memonitoring selama kegiatan PRA berlangsung. (Nobel & Krisnani, 2021)

Alur tahapan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* diadaptasi dari (Ade Supriatna, 2014) diantaranya yaitu;

Pertama, Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum.

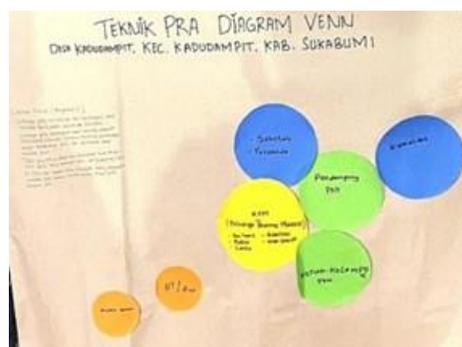
Sebelum melakukan kegiatan PRA bersama masyarakat praktikan melakukan penjalinan relasi dengan masyarakat untuk mencari informasi dan isu permasalahan sosial yang terjadi di Desa Kadudampit. penjalinan relasi juga penting dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan beberapa masyarakat sebagai Langkah awal untuk dapat menjangkau elemen-elemen yang ada di masyarakat.

Proses penjalinan relasi ini mendapati hasil bahwa Program keluarga harapan menjadi isu utama yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan PRA. Praktikan dibagi menjadi empat kelompok sesuai jumlah dusun yang ada di Desa Kadudampit. Kegiatan membaur dengan masyarakat seperti ketua RW, Ketua RT, Ketua Kelompok PKH, Anggota KPM, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, petani, warga setempat dan lain sebagainya mengajak untuk berbincang dengan mereka terkait keadaan wilayah termasuk permasalahan dan potensi terkait program bantuan PKH. Setelah itu Sebagian dari mereka juga ada yang mengajak berkeliling di sekitar wilayahnya untuk melakukan observasi dan memberi informasi terkait masyarakat yang mana saja yang mendapatkan program bantuan PKH.

Kedua, Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah

Pada tahap ini untuk merumuskan suatu masalah pada program PKH maka diperlukan teknik PRA sebagai mediana. Dalam proses pelaksanaannya jumlah petugas PRA dari praktikan berjumlah tiga belas orang yang terbagi menjadi tiga tim sesuai dengan teknik PRA yang akan di implementasikan. Kemudian untuk jumlah kader lokal sebagai tim inti PRA berjumlah 11 orang yang dipilih dari ketua kelompok PKH. Adapun anggota yang hadir pada pelaksanaan PRA berjumlah 40 orang. Kegiatan PRA diawali dengan registrasi atau absen, kemudian hadirin duduk secara lesehan kemudian dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tugas dari petugas pemandu diskusi memimpin implementasi dari setiap sesi teknik yaitu pertama diagram venn, teknik bagan kecenderungan, dan terakhir pohon masalah. Kemudian penetapan tujuan PRA dari analisis masalah dan kebutuhan serta penetapan kebutuhan informasi untuk KPM PKH. Berikut pemaparan dari ketiga teknik PRA:

- **Diagram Venn**



Gambar 1 sumber data primer teknik diagram venn

Dengan partisipasi dari Anggota KPM PKH teknik PRA yang dilakukan pertama adalah pembuatan Diagram Venn. Diagram Venn mengkaji hubungan masyarakat atau anggota KPM dengan lembaga yang ada di desa tersebut. Pada pelaksanaannya alat dan bahan yang

diperlukan yaitu kertas plano, origami, spidol, gunting dan lem. Kemudian dalam kegiatan ini peneliti sebagai fasilitator, dimana peneliti berperan sebagai pihak yang menstimulasi dan mendukung serta memberikan edukasi dan arahan agar partisipan dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam diskusi pelaksanaan teknik PRA Diagram Venn. Adapun kesimpulan hasil dari kajian bersama menggunakan teknik diagram venn partisipan mengurutkan skala prioritas Lembaga yaitu terdapat Sekolah, Posyandu, Kemensos, Pendamping PKH, Ketua kelompok PKH, RT, RW dan kepala dusun.

Dari hasil teknik diagram Venn mendapatkan informasi bahwa lembaga yang bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap KPM adalah sekolah dan posyandu. Kemudian Lembaga yang berpengaruh besar terhadap program PKH adalah Kementerian Sosial. Dimana Kemensos berhubungan dengan pendamping PKH dan bermanfaat besar terhadap KPM. Selanjutnya Tokoh yang paling dekat dan bermanfaat besar bagi KPM adalah ketua kelompok KPM dari masing-masing RW dan pendamping PKH. Adapun RT/RW dan Kepala dusun dianggap kurang berpengaruh terhadap KPM karena mereka kurang terlibat pada program PKH.

- **Bagan Perubahan dan Kecenderungan**

Kelompok PKH	Jumlah Anggota	PERIODE						CATATAN
		1	2	3	4	5	6	
1	31	0000	0000	0000	0000	0000	0000	○ 5 laporan ● 1 laporan
2	16	000	000	000	00	00	00	
3	8							
4	17	00	000	000	000	000	000	
5	28					00	00	
6+12	25	00	00	00	00	00	00	
7	25		000		000	0000	0000	
8	25	00	00	00	00			
9	28	00000	0000	0000	0000	0000	0000	
10	21	00	000	000	000	000	000	
11	24	000	000	000	000	000	000	

Gambar 2 sumber data primer teknik bagan kecenderungan

Tim teknik bagan kecenderungan berjumlah lima orang dan hanya melibatkan ketua kelompok PKH. Bagan kecenderungan merupakan teknik PRA yang memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan yang ada pada masyarakat dari waktu ke waktu. Masyarakat dapat mengamati adanya kecenderungan perubahan yang terjadi baik berkurang, tetap ataupun bertambah. Dalam kasus terkait Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Kadudampit kami mengangkat tema yaitu jumlah pelaporan selama pencairan 3 periode ke belakang. Teknik ini melibatkan ketua kelompok PKH karena salah satu tugas ketua kelompok yaitu menghimpun pelaporan pencairan dana bantuan PKH dari Anggotanya. Hasil dari penerapan teknik ini adalah banyak kelompok PKH yang kurang lengkap dalam pelaporan pencairan dana kepada ketua kelompok PKH. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa penyebab seperti kelalaian seperti hilang, komunikasi, dan kesadaran dari anggota kelompok PKH.

- **Pohon Masalah**



Gambar 3 sumber data primer teknik pohon masalah

Kemudian yang terakhir dari tim teknik pohon masalah berjumlah empat orang. Dalam

penerapan teknik pohon masalah, tim PRA meminta pendapat dari anggota kelompok PKH tentang apa yang menjadi masalah utama dari program PKH di Desa Kadudampit. Setelah beberapa anggota kelompok PKH bersuara dapat diketahui yang menjadi masalah utama dalam program PKH yaitu bantuan yang tidak cair, dalam hal ini juga termasuk pencairan yang tidak terjadwal.

Hal yang juga dapat menjadi faktor bantuan tersebut tidak cair yaitu pengumpulan data dari KPM yang tidak lengkap sehingga menghambat penyaluran data dari ketua kelompok PKH kepada pendamping PKH. Tidak cairnya dana juga bisa diakibatkan oleh adanya pelaporan dari pihak sekolah jika suatu anak yang termasuk salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak masuk sekolah ataupun sering bolos dan lain-lain. Hal itu diketahui karena tugas monitoring ke sekolah untuk menerima laporan dari sekolah terkait anak yang tercatat sebagai anak dari Keluarga Penerima Manfaat.

Akibat dari dana yang belum cair yaitu bentuk protes dari warga kepada aparat desa. Padahal terkait data Program keluarga Harapan tidak secara rinci dipegang oleh pemerintah desa melainkan langsung dari pusat yaitu Kementerian Sosial. Komunikasi yang belum optimal bisa menjadi akibat dari warga yang protes karena dana tidak cair dan juga didapati pencairan yang ada tidak merata, dalam hal ini seperti keluarga yang sekiranya dari keluarga mampu namun justru mendapatkan bantuan PKH.

Dampak yang akhirnya dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yaitu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi terganggu bila bantuan tidak cair dan bagi pendamping PKH menjadi terkendala dalam pengolahan data KPM yang berantakan karena tidak melapor ataupun menerima laporan dari lembaga terkait dalam pemenuhan kewajiban bagi keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan.

Data yang telah diperoleh dari hasil kajian menggunakan teknik-teknik PRA, dibantu dengan data primer melalui observasi, wawancara secara langsung, serta dukungan dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal online, maka dapat diketahui permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat KPM di Desa Kadudampit, yakni sebagai berikut:

- **Permasalahan:** Belum optimalnya alur koordinasi dalam penanganan data Keluarga Penerima Manfaat yaitu mengenai Masih rendahnya peran dan partisipasi kelompok PKH dalam proses pelaporan data PKH. Kemudian Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan PKH yaitu mengenai Kurangnya pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dan tidak bergantung terhadap program bantuan.
- **Potensi:** Terdapat ketua kelompok PKH di setiap RW Desa Kadudampit yang aktif sehingga memudahkan para KPM untuk berkoordinasi dan berbagi informasi terkait program bantuan PKH.

Ketiga, Perencanaan penerapan gagasan.

Setelah kegiatan PRA selesai maka dapat ditemukannya sebuah masalah dan potensi yang ada di Desa Kadudampit terkait program bantuan PKH. Kemudian peneliti mengajak perwakilan yaitu ketua kelompok PKH yang disebut juga sebagai tim PRA untuk diadakannya FGD (*Forum Group Discussion*) untuk membahas mengenai rancangan program. Melalui kegiatan PRA ditemukan masalah, meliputi:

- Kekurangan struktur kepengurusan kelompok PKH dimana hanya dipimpin oleh ketua saja. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan data, pencatatan, hingga pemberkasan dilakukan oleh ketua PKH. Sebagian besar ketua kelompok PKH merasa kesulitan, ditambah dengan sebagian anggota KPM kurang bisa diajak kerja sama dalam pengumpulan pelaporan. Hal ini menyebabkan ketua kelompok kewalahan, hingga akhirnya data yang dikumpulkan kepada pendamping PKH menjadi tidak lengkap. Selain itu, beberapa ketua kelompok PKH kurang aktif, sehingga seringkali diwakili oleh anggotanya dalam pengerjaan tugas ketua kelompok PKH.
- Permasalahan lainnya yang ada pada kelompok PKH mengenai dimana tidak adanya

pertemuan. Diawali dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 lalu sehingga pertemuan yang rutin dilaksanakan menjadi terhambat.

- Pola pikir dan pemahaman KPM dalam menanggapi bantuan PKH yakni menganggap dana PKH seperti gaji. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan PKH.

Berdasarkan masalah-masalah diatas, melalui kegiatan FGD juga dalam menyusun dan menentukan rancangan program dalam hal ini menggunakan metode SMART. SMART berarti memiliki tujuan yang spesifik dan terukur (*Specific and Measurable*), dapat diraih/realistis (*Attainable*), relevan dan berjangka waktu (*Relevant and Timely*). Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran-sasaran yang terukur secara otomatis akan lebih memotivasi daripada target yang tidak jelas. Paul J. Meyer mendeskripsikan karakteristik pengukuran SMART sebagai berikut;

- 1) Spesifik. berarti menjabarkan sasaran secara jelas dan tanpa ambigu. Beberapa atribut yang digunakan yaitu dengan mengevaluasi: apa yang ingin dicapai? Alasan atau keuntungan apa yang ingin diraih dengan mencapai sasaran itu? Siapa saja yang terkait dan berhubungan dengan pencapaian sasaran? Dimana lokasi atau fasilitas/prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan?
- 2) Terukur, yaitu pengukuran yang kongkrit seperti berapa banyak atau kapan sebuah sasaran bisa diketahui telah dicapai. Hal ini mesti dapat diperhitungkan dari awal penetapan targetnya.
- 3) Realistis (*attainable*), yaitu menekankan pada pentingnya seberapa realistis sebuah target itu. Jika sasarannya terlalu jauh diluar standar, bisa menjadi demotivator karena tidak sesuai dengan keahlian, kapasitas, kemampuan, serta perilaku yang dimiliki untuk meraih sasaran tersebut. Sehingga kemungkinan bagaimana sebuah tujuan dapat diraih bisa terjawab ketika mulai menilai sebuah kelayakan target.
- 4) Relevan, sebuah tujuan bisa saja spesifik, terukur, realistis, dan ada batas waktu, namun jika tidak relevan terhadap atasan, manajemen dan perusahaan secara keseluruhan maka tidak akan didukung penuh oleh tim kerja atau rekan/mitra kerja yang lain.
- 5) Timely, ukuran waktu dengan kerangka waktu dalam memulai serta tenggat waktu yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan ini bisa diuraikan dengan memilah strategi menjadi taktik jangka pendek atau aktivitas harian, lalu taktik jangka menengah, dan jangka panjang atau tahunan serta lima tahunan supaya indikator-indikator yang menunjukkan kemajuan menuju pencapaian dapat dievaluasi dan dire-evaluasi. (D & R, 2017)

Melalui kegiatan FGD yang dilakukan bersama tim inti PRA didapati beberapa usulan yang disetujui oleh tim inti PRA. Adapun hasil dari diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Penambahan struktur kepengurusan kelompok PKH yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.**

Dengan begitu maka diharapkan akan terbentuk alur koordinasi kepengurusan yang efektif sehingga jumlah pelaporan pencairan bantuan dapat mencapai 80% dari total jumlah KPM di masing-masing Kelompok PKH yang diharapkan mulai dari Periode Bantuan PKH ke-4 Tahun 2022 dan seterusnya. Tujuan jangka panjang yang ingin di capai dalam pengusulan ini yaitu perbaikan alur koordinasi dan pendataan pelaporan pencairan bantuan PKH pada Kelompok-Kelompok PKH dengan mempertimbangkan penambahan dalam struktur kepengurusan masing-masing Kelompok PKH dimana akan ditambahkan struktur Bendahara dan Sekretaris yang akan membantu koordinasi dan pendataan Kelompok PKH bersama Ketua Kelompok PKH mulai dari periode bantuan ke-4 PKH Tahun 2022 dan seterusnya. Sekretaris pada pengusulan ini berperan dalam mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti pencairan dana bantuan setiap periode oleh KPM dalam masing-masing Kelompok PKH, Sekretaris juga berperan mencatat KPM yang keluar/selesai dan masuk kedalam Kelompok PKH. Sedangkan bendahara dalam pengusulan ini berperan dalam membuat dan memegang anggaran atau kas untuk operasional struktur serta kegiatan KPM di Kelompok PKH itu sendiri. Diharapkan

melalui pengusulan ini akan terbentuk struktur kepengurusan di Kelompok-Kelompok PKH, dengan jumlah laporan pencairan bantuan mencapai 80% dari total jumlah KPM di masing-masing Kelompok PKH mulai dari periode bantuan PKH tahap 4 Tahun 2022 dan seterusnya. Pengusulan ini bisa dicapai jika di dukung oleh KPM itu sendiri dengan sepengetahuan Pendamping PKH dan Pihak Kantor Desa Kadudampit. Pengusulan ini juga dapat dicapai karena kepengurusan Kelompok PKH itu sendiri yang di pegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pengambilan keputusan dengan musyawarah.

2. Adanya jadwal pertemuan rutin kelompok PKH,

Dimana melakukan musyawarah antara ketua dan anggota kelompok PKH membahas seputar informasi bantuan PKH yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Melalui kegiatan tersebut diharapkan alur koordinasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengusulan ini yaitu terjalannya alur koordinasi yang baik antara ketua dan anggota kelompok PKH sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dan minimnya informasi yang diterima oleh KPM mulai dari periode bantuan ke-4 PKH tahun 2022 dan seterusnya. Diharapkan melalui pengusulan ini dapat terbentuknya alur koordinasi yang baik antara ketua dan anggota kelompok PKH dengan diadakannya pertemuan rutin tiap 2 bulan sekali pada setiap periode pencairan. Pengusulan ini dapat dicapai jika didukung oleh partisipasi kooperatif dari ketua dan anggota kelompok PKH yang mana sebagai bagian dari KPM dan juga didukung dengan akses yang mudah dijangkau serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga pertemuan dapat terlaksana.

3. Pelatihan Keterampilan KPM melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa.

Hal ini agar KPM dapat mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan dana PKH. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keahlian kepada KPM PKH untuk memanfaatkan sumber daya yang terdapat di Desa Kadudampit serta mengolahnya guna menunjang perekonomian bagi KPM PKH. Maka dari itu terdapat beberapa program berdasarkan sumber daya yang terdapat di Desa Kadudampit yang diusulkan dalam proposal pengabdian ini, yaitu:

1. Literasi Pemasaran Usaha Via Online (E-Commerce)
2. Pelatihan Kerajinan Tangan dari Sumber Daya Bambu
3. Pemanfaatan Sumber Daya Sawi oleh KPM dengan diolah menjadi makanan ringan yang bisa dipasarkan.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengusulan ini yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memiliki keterampilan mandiri dan tidak bergantung kepada dana bantuan PKH dengan mengimplementasikan program-program pemberdayaan yang telah diusulkan. Di mana program-program tersebut memberikan pengetahuan dan keahlian kepada KPM PKH untuk memanfaatkan sumber daya yang terdapat di Desa Kadudampit serta mengolahnya guna menunjang perekonomian bagi KPM PKH agar tidak lagi bergantung dengan dana bantuan PKH. Program - program tersebut diusulkan untuk diimplementasikan mulai dari periode bantuan PKH ke- 4 tahun 2022 dan seterusnya. Program ini dapat dicapai karena mayoritas KPM PKH berprofesi sebagai ibu rumah tangga sehingga memiliki waktu luang yang cukup untuk mengikuti program pelatihan keterampilan.

Keempat, Pelaksanaan Program. Dalam tahap ini hasil dari FGD dan rancangan program direalisasikan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Namun dalam penelitian kami kegiatan yang dilakukan tidak sampai pada tahap pelaksanaan karena keterbatasan waktu dan tempat ketika kami berada di Desa Kadudampit

Kelima, Evaluasi Program. Setelah program dilaksanakan maka perlu adanya Evaluasi agar Tim PRA bersama masyarakat mengetahui dalam pelaksanaan program tersebut apa yang sudah baik dilaksanakan dan yang belum bisa dikaji dan dicari solusi untuk keberlangsungan program dari PRA yang melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan tingkat partisipasinya Arnstein dibagi menjadi; Tangga 1 *manipulation*, dan 2 *therapy*, termasuk kategori Non Partisipasi, artinya keterlibatan masyarakat hanya untuk

melegitimasi kekuasaan pihak luar. Tangga 3 *informing*, 4 *consultation*, dan 5 *placation* termasuk dalam kategori Tokenisme, artinya masyarakat terlibat namun belum memperoleh keuntungan berarti dari program. Tangga 6 *partnership*, 7 *delegated power*, dan *citizen control* termasuk kategori *Citizen power*, artinya masyarakat diberikan kekuasaan untuk mengelola program. Dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial bersama masyarakat dilakukan dalam implementasi dari teori Arnstein yaitu:

1. **Informing**

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan sekedar melakukan pemberitahuan searah atau sosialisasi ke komunitas sasaran program tetapi tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feedback*). Praktikan dalam hal ini juga melakukan penjalinan relasi ke civitas pemerintah desa Kadudampit kemudian dari pihak pemerintah desa memberikan arahan kepada kepala Dusun dan stakeholder lainnya tentang adanya mahasiswa praktikum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang bertugas dan wajib untuk membantu partisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa praktikum yaitu PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang dilaksanakan selama 40 hari di Desa Kadudampit

2. **Consultation**,

masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat, namun pendapat tersebut tidak diperhitungkan. Pada tahap ini praktikan mulai menelaah dan mengkaji apa yang menjadi potensi dan isu utama masalah yang terjadi di Desa Kadudampit. Pengumpulan data primer dan sekunder sangat penting dilakukan agar bisa dianalisis sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah dikaji bersama akhirnya isu PKH yang menjadi permasalahan di Desa Kadudampit. Setelah mengetahui Isu utama maka diperlukannya forum diskusi bersama masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam program PKH dengan menggunakan alat teknik PRA. Dalam tahap ini diperlukan partisipasi dari masyarakat penerima manfaat PKH (KPM) termasuk ketua kelompok PKH untuk menjadi Tim PRA. Kegiatan forum diskusi berlangsung tingkat partisipasi yang hadir pada hari pelaksanaan berjumlah 40 orang yang terdiri dari 11 ketua kelompok PKH dan 29 anggota serta 1 pendamping PKH Desa Kadudampit. Tahap ini merupakan *Assesment* untuk mengkaji faktor penyebab munculnya permasalahan dan memahami apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Tahap *Assesment* ini difokuskan terhadap proses konsultasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan potensi yang ada di masyarakat Desa Kadudampit.

3. **Placation**, yaitu masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan, namun mereka belum merasakan keuntungannya. Pada tahap ini meneruskan dari forum diskusi bersama masyarakat KPM PKH maka dilanjutkan dengan FGD yang dilakukan sebagai kelanjutan dari hasil dari rumusan masalah yang telah dilakukan oleh Tim PRA dan masyarakat KPM PKH. Pada tahap ini FGD dilakukan dalam merancang perencanaan suatu program oleh karena itu menurut Arnstein dalam tahap ini usulan program melibatkan partisipasi masyarakat. Setelah usulan program sudah terbentuk maka disusun suatu proposal perencanaan program untuk diberikan kepada pemerintah Desa dan tingkat Kecamatan sebagai referensi solusi dalam permasalahan PKH di Desa kadudampit.

Menurut tangga Arnstein di atas partisipasi masyarakat tersebut berada pada tahap *informing*, *consultation*, dan *placation*. Arnstein menyebut tingkatan tersebut sebagai tingkat "tokenisme" yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka yang dituangkan dalam proposal perencanaan program akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan yaitu pemerintah desa Kadudampit dan Kecamatan kadudampit.

Dalam akhir kegiatan praktikan juga melakukan Terminasi. Tahap ini merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.

Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah mandiri, namun karena intervensi sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jenis terminasi yang akan diterapkan yaitu (*Cyclical Termination*) karena hasil perencanaan program melalui metode SMART ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk proposal pengabdian dengan harapan program usulan ini dapat diterima oleh Kecamatan Kadudampit dan menjadi suatu siklus yang berkelanjutan oleh pemerintah Desa Kadudampit. (Adi, 2015)

Pada tahapan ini mahasiswa Praktikan melaksanakan acara penutupan di aula kantor Desa Kadudampit yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil selama di Desa Kadudampit sejak tanggal 18 Juli - 22 Agustus 2022. Kemudian acara ditutup dengan penyerahan secara simbolik berupa cinderamata, dan piagam kepada Desa Kadudampit karena telah menerima dengan baik dan bekerjasama dengan mahasiswa selama Praktikum II berlangsung.

Setelah itu mahasiswa dari hasil PRA dan FGD bersama masyarakat KPM PKH membuat proposal perencanaan program tentang usulan atau program yang dapat menguatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadudampit. Penutupan dilakukan dengan model *Case Confrence* dan penyerahan proposal yang diikuti wajib oleh seluruh mahasiswa Praktikan selama menjalankan tugas di Kecamatan Kadudampit tahun 2022

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PRA, maka teridentifikasi beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di Desa Kadudampit yaitu : (1) Peran dan partisipasi KPM pada proses pelaporan data PKH masih rendah hal ini dapat dilihat dari kelengkapan data yang dipegang oleh masing-masing ketua kelompok PKH; (2) Rendahnya pemahaman masyarakat akan skema bantuan PKH, disebabkan kurangnya pelatihan untuk mmbangun kemandirian dan tidak bergantung terhadap program bantuan. Berkenaan dengan ditemukannya kendala-kendala ini, maka melalui PRA disepakati secara mufakat oleh KPM PKH Kadudampit untuk merumuskan beberapa program yang diperoleh dari diskusi PRA, yaitu (1) Penambahan strukur kepengurusan kelompok PKH yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara; (2) Adanya jadwal pertemuan rutin kelompok PKH; (3) Pelatihan Keterampilan KPM melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar* (2nd Ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- D, R., & R, R. (2017). Evaluasi Penilaian Kinerja Dengan Menggunakan Metode SMART Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja. *ISEI Business And Management Review*, 1(2).
- Hudayana, B., Kutaneegara, P., Setiadi, M., Indiyanto, S., Fauzanafi, A., Nugraheni, Z., M, D., Sushartami, F., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22146/Bb.50890>
- Kemertrian Sosial RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra). *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 1(1), 55–61.
- Miller, B., Kral, M., & Aragon, O. (2020). Participatory Action Research: International Perspectives And Practices. *International Review Of Qualitative Research*, 13(2).
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). *PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*. Deepublish Publisher.

- Nobel, S., & Krisnani, H. (2021). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Rendahnya Interaksi Di Dalam Keluarga Pada Era Digital. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 473. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.28206>
- Purnaningsih, N., & Lestari, E. (2021). KEBERLANJUTAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI BAGI SATU KELOMPOK WANITA TANI DI KELURAHAN BEJI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Agro Ekonomi*, 39(1). <https://doi.org/10.21082/jae.v39n1.2021.69-80>
- Ridwan, I., Dollo, A., & Andriyani. (2019). Implementasi Pendekatan Participatory Rural Appraisal Pada Program Pelatihan. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/pls.v3i2.34913>
- Sari, A. G., & Marom, A. (2020). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 3.
- Silverman, S., & Silverman, N. (1994). *Using Total Quality Tools For Marketing Research: A Qualitative Approach For Collecting Organizing, And Analyzing Verbal Response Data*.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Supriatna, A. (2014). Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang. *Jurnal Lingkungan Widyaiswara*, 1, 39–45. http://juliwi.com/published/E0101/Paper0101_39-45.pdf
- Supriatna, Ade. (2014). RELEVANSI METODE PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(1).